

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Astawa, I. Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Djazuli, Fiqh Siyasah. 2004. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Mansyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Faris, Abu. 2016. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas. Yogyakarta: Kanisius.
- Hilmi, Mahmud. 1978. *Nizham Al -Hukm Al -Islami*. Kairo: dar al-hadi
- HR, Ridwan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Al-Mawardi, Imam. 1960. *AhkamAs-Sulthaniyah*. Edisi Pertama. Beirut-Lebanon: Daar El-Fikri.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan. 2004.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kahllaf, Abdul Wahhab. 1977. *Al -Siyasah al -Syar 'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jalarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khaldun, Muhammad Ibnu. 1986. Muqaddimah. Jakarta: Pustaka Firdaus, Terj. Ahmadie Thoha.
- Khoiriah, Siti. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Lampung*. *Jurnal hukum FH Unila*.

- Kogoya, Willus. 2015. *Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Manam, Bagir. 1988. “*Dasar-Dasar Perundang-Undangan*”,
- Nihal Jayawickrama. 2002. *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) UII.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. FH Undip
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Administrative Law & Governance Journal. Prinsip Legalitas dalam Administrasi Publik dan Tantangan Implementasinya. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2. Issue 2. 2019.
- Arifin, M. Zainul., Yunial Laily Mutari dkk, *Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Juni 2020.
- Barniat, Zulman. *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal*. Lampung: Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5. No 1. Juli 2019.
- Faissal Malik. *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Vol. 9 No. 1. 2021.

Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006 Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia. Vol. 18 No. 1. Lex Jurnalica. 2021.

Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*, Jakarta: Jurnal Penelitian Politik Volume 13 No. 2 Desember 2016.

Osgar S Matombo, Dkk, 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang, Intrans Publishing

Rhaysya Admmi Habibani, Aldri Frinaldi dan Roberia. Penerapan Prinsip Asas Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik. Gudang Jurnal Multi Disiplin Ilmu Vol.2 No.12. Desember 2024.

Riyadi, Eko. 2015. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia* (Kajian Multi Perspektif). Yogyakarta: PUSHAM UII.

Selim, Agus. 2018. *Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: Program Magister Manajemen. Srie Widya Wiwaha.

SF Marbun, Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Shadili, Hasan. 1980. Pimpinan Redaksi *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

Wasistiono, S. 2020. *Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Omnibus Law, Jurnal Birokrasi dan Hukum Publik*. Volume 4. Nomor 1.

WEBSITE

Dimas Hutomo, “*Bolehkah Anak Perangkat Desa Mencalonkan Diri Menjadi Perangkat Desa*”, Februari 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-anak-perangkat-desa-mencalonkan-diri-menjadi-perangkat-desa>

Yudha Pradana, “*Nepotisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Kerangka Hukum Indonesia*”, April 2025 <https://m.kumparan.com/yudha-pradana/nepotisme-pengangkatan-perangkat-desa-berdasarkan-kerangka-hukum-di-indonesia>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 308 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa

Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa